

IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN STIMULAN PERMUAHAN SWADAYA TAHUN 2016 (STUDI KASUS KOTA PEKANBARU)

Oleh : Nuraida Mailasari (1301120658)

Nuraidamay40@gmail.com

Pembimbing : Dr. H. Zaili Rusli SD, M.Si

Jurusan Ilmu Administrasi-Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. HR Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru

29293

Telp/Fax 0761-63272

ABSTRACT

The house is a basic need and has a function that is essential for human life. The house also as one of the main elements for the welfare of the people. To improve the welfare of the people the government implement a program to assist low-income communities (MBR) to obtain appropriate housing.

One government program is a program BSPs issued by the Ministry PUPR under Regulation Ministry of Public Works and Public Housing No. 13 / PRT / M / 2016 on Governmental Housing Assistance stimulants. BSPs program will be implemented by the provincial government through the Department of Public Works in every province. Pekanbaru City North Tangkerang particularly sub-district is one of the program managers BSPs, North Tangkerang a result of the development of the Village area Tangkerang.

The purpose of this study was to determine how the implementation of the Regulation of the Ministry of Public Works and Public Housing No. 13 / PRT / M / 2016 on Governmental Housing Assistance stimulants. This research was conducted using qualitative research method by using interview, observation and documentation by using key informants and results on the ground as a source of information.

These results indicate that the BSPs Department of Housing, Settlement and Land Region of Riau Province as Committing Officer and the Department of Housing and Settlement Region Pekanbaru City as Technical team BSPs program has been implemented properly. The problems caused by less accurate data so that the receiver can register themselves every aspect of the program so much that did not pass the identification and verification, as well as recipients who refuse to accept the program because we are not able to do self-help, and the lack of building materials from material suppliers.

Keywords: Implementation, District of North Tangkerang

Latar Belakang

Masalah rumah merupakan unsur utama bagi kesejahteraan masyarakat, maka permasalahan rumah menjadi tanggung jawab pemerintah. Dalam menjawab permasalahan tentang rumah masyarakat, pemerintah telah menyiapkan berbagai program nasional untuk membantu Masyarakat Berpenghasilan Rendah untuk mendapatkan rumah yang layak huni. Dari banyaknya program pemerintah tentang rumah bagi MBR ada program yang baru dikeluarkan akhir tahun 2015 yaitu Program BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya), berdasarkan Peraturan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13/PRT/M/2016 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya merupakan program untuk meningkatkan prakarsa Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam membangun/peningkatan kualitas rumah beserta prasarana, sarana, dan utilitas. Tujuan dari program ini adalah terbangunnya rumah yang layak huni oleh MBR yang didukung dengan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) sehingga menjadikan perumahan yang sehat, aman, serasi, dan teratur serta berkelanjutan.

Untuk mendapatkan program BSPS, Masyarakat yang akan menjadi penerima bantuan harus memenuhi syarat. Adapun beberapa persyaratan bagi MBR untuk menjadi penerima BSPS, yaitu:

- a. Warga Negara Indonesia yang sudah berkeluarga
- b. Memiliki atau menguasai tanah
- c. Belum memiliki rumah, atau memiliki dan menepati rumah satu-satunya dengan kondisi tidak layak huni
- d. Belum pernah memperoleh BSPS dari pemerintah pusat
- e. Berpenghasilan paling banyak senilai upah minimum provinsi setempat
- f. Diutamakan yang telah memiliki keswadayaan dan berencana membangun atau meningkatkan kualitas rumahnya

g. Bersedia membentuk kelompok, dan

h. Bersedia membuat pernyataan

Dalam melaksanakan program BSPS Kementerian PUPR akan menyerahkan penyelenggaraan program kepada Dinas bagian perumahan di setiap Provinsi yang akan menerima usulan desa/kelurahan sebagai calon lokasi BSPS dari Bupati/Walikota, berdasarkan Persyaratan:

1. Jumlah RTLH di desa/kelurahan
2. Jumlah kekurangan rumah di desa/kelurahan

Setelah mendapatkan usulan dari Bupati/Walikota, selanjutnya Dinas Provinsi bagian Perumahan akan melakukan verifikasi terhadap usulan bupati/walikota, berdasarkan persyaratan:

1. Tingkat kemiskinan kabupaten/kota
2. Jumlah RTLH kabupaten/kota
3. Jumlah kekurangan rumah di kabupaten/kota
4. Kapasitas pemerintah kabupaten/kota di bidang perumahan

Kegiatan program BSPS ada beberapa bentuk kegiatan pelaksanaan program, yaitu:

1. Pelaksanaan BSPS berupa uang
2. Pelaksanaan BSPS berupa bangunan untuk rumah
3. Pelaksanaan BSPS berupa rumah
4. Pelaksanaan BSPS berupa bahan bangunan untuk PSU (Prasarana, Sarana, Utilitas umum)

Provinsi Riau juga menjadi salah satu pelaksana program BSPS dengan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang memperoleh kuasa wewenang oleh pengguna anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk mengambil keputusan atau tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN di Kementerian PUPR.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau juga mengirimkan usulan penerima BSPS ke

Dirjen Perumahan Swadaya Kementerian PUPR untuk tahun 2016, dan menerima penetapan lokasi di beberapa Kabupaten/Kota dengan total 1739 unit. Berikut adalah data untuk seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Riau.

Dari total 1739 unit penerima program BSPS untuk di setiap Kabupaten/Kota rincian di setiap daerah yaitu 394 unit untuk Kabupaten Kampar, 342 unit untuk Kabupaten Rokan Hulu, 297 unit untuk Kabupaten Indragiri Hulu, 172 unit untuk Kabupaten Siak, 164 unit untuk Kota Pekanbaru, dan 370 unit untuk Kabupaten Kepulauan Meranti.

Kota Pekanbaru merupakan salah satu kota yang menjadi kota penerima program BSPS, ada 164 unit yang menjadi target Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Walaupun bisa dikatakan jumlah yang kecil untuk penerima program BSPS, namun banyak daerah yang lain yang memenuhi kriteria umum Kabupaten/Kota penerima program BSPS padahal Kota Pekanbaru merupakan Kota dengan tingkat kemiskinan yang paling rendah yaitu 3,27% dibandingkan daerah yang tidak mendapatkan program BSPS seperti Kabupaten Bengkalis (7,38%), Kabupaten Indragiri Hilir(8,11%), Kabupaten Kuantan Singingi(10,8), Kabupaten Pelalawan(12,9%), Kabupaten Rokan Hulu(11,05%), Kota Dumai(5,26%).

Berdasarkan kriteria umum untuk Kabupaten/Kota maka penelitian ini dilakukan di kota Pekanbaru yang sebagai kota yang maju namun menjadi penetapan lokasi penerima program BSPS apabila dibandingkan dengan 5 daerah Kabupaten/Kota yang menjadi penerima program BSPS yang memiliki tingkat kemiskinan daerah yang tinggi. Ini adalah tabel penerima BSPS di Kota Pekanbaru:

Jumlah penetapan lokasi program BSPS di kota Pekanbaru adalah 164 unit, dengan rincian Kecamatan Bukit Raya 41 unit yaitu pada kelurahan Tangkerang Utara, Kecamatan Tenayan Raya 43 unit yaitu pada Kelurahan Sail dan Kecamatan Payung Sekaki 80 unit yaitu pada

Kelurahan Labuh Baru Barat 43 unit dan Kelurahan Tampan 37 unit. Payung sekaki merupakan kecamatan yang menjadi target terbesar di Kota Pekanbaru, dengan Kelurahan Labuhan Baru 43 rumah dan Tampan 37 rumah. Dalam program ini bantuan yang diberikan oleh pemerintah yaitu dengan memperbaiki kerusakan pada rumah MBR dengan memberikan bahan bangunan.

Setelah penetapan lokasi penerima program BSPS, selanjutnya Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di tingkat provinsi akan memberikan daftar penerima program BSPS ke Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru sebagai Tim Teknis yang dibantu oleh Tenaga Fasilitator Lapangan dari provinsi. Untuk melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap calon penerima bantuan di lokasi. Untuk Kota Pekanbaru bantuan langsung diberikan dalam bentuk bahan bangunan. Setelah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru melakukan identifikasi dan verifikasi penerima bantuan, berikut data setelah penilaian lokasi:

Setelah tim teknis melakukan identifikasi dan verifikasi calon penerima program BSPS, di kelurahan Tangkerang Utara dari alokasi yang berjumlah 41 calon penerima menjadi 20 penerima, Kelurahan Labuh Baru Barat dari alokasi 43 calon penerima menjadi 43 penerima, Kelurahan Sail dari alokasi 43 calon penerima menjadi 43 penerima dan Kelurahan Tampan dari alokasi 37 calon penerima menjadi 19 penerima dan melengkapi persyaratan administrasi dan menyusun dokumen teknis dibantu oleh TFL. Setelah mendapatkan dokumen admnistasi dan dokumen teknis, lalu TFL membuat permohonan proposal penerima yang lolos identifikasi dan verifikasi kepada PPK.

Dan setelah disetujui oleh PPK maka total dari penerima adalah 125 SK yang dikeluarkan oleh PPK. Dengan dua Kelurahan yaitu Kelurahan Tangkerang

Utara dan Kelurahan Tampan yang tidak sampai setengah dari alokasi calon penerima menjadi penerima. Namun setelah PPK mengeluarkan SK ada 3 pembatalan yaitu di Kelurahan Sail 1 pembatalan dan Tampan 2 pembatalan, pembatalan dilakukan oleh penerima BSPS.

Setelah mengeluarkan SK maka PPK akan melakukan penyaluran BSPS, karna di Kota Pekanbaru program penyelenggaraan BSPS berupa bahan bangunan untuk rumah maka TFL melakukan identifikasi penyedia bahan bangunan di setiap kelurahan tersebut

Setelah melukan kerja sama dengan pihak took bangunan sebagai penyedia barang, maka penyedia barang akan menyalurkan bahan bangunan kepada penerima bantuan sesuai dengan kesepakatan dengan PPK. Setelah penerima BSPS menerima bahan bangunan maka penerima BSPS menandatangani berita acara serah terima.

Setelah mendapatkan bahan bangunan maka penerima BSPS akan melakukan Perbaikan Kualitas (PK) baik PK ringan, PK sedang dan PK berat. Setelah melakukan perbaikan, penerima BSPS wajib meghuni rumah hasil PK. Penerima juga bertanggung jawab atas hasil fisik pelaksanaan PB atau PK dengan menyampaikan Laporan penggunaan bahan bangunan disertai foto rumah.

Sebagai kota yang memiliki tingkat kemiskinan terendah di Provinsi Riau, kota Pekanbaru juga menjadi salah satu kota penerima program BSPS. Padahal dalam kriteria umum penerima program BSPS Kota/Kabupaten adalah tingkat kemiskinan yang melebihi rata-rata tingkat kemiskinan nasional. Dan penulis ingin meneliti akan melakukan penelitian di Kelurahan Tangkerang Utara yang merupakan salah satu Kelurahan yang menerima program dan setelah dilakukan verifikasi kurang dari setengah mendapatkan program.

Berdasarkan fenomena diatas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian terhadap pelaksanaan program

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dengan judul penelitian **“Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Provinsi Riau Tahun 2016 (Studi Kasus Kota Pekanbaru)”**

Rumusan Masalah

Berdasarkan pengamatan dan kajian sementara terhadap permasalahan yang ada, penulis mencoba melakukan identifikasi mengenai Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kota Pekanbaru, penulis dapat rumuskan seperti ini:

1. Bagaimana implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kota Pekanbaru?

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dengan melaukan penelitian tentang Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kota Pekanbaru Tahun 2016 dari segi ilmu pengetahuan dan manfaat prkatis dalam analisis kebijakan terdapat beberapa manfaat yang dapat diambil, baik dari dimensi teoritis maupun dimensi prkatis manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Bahan masukan bagi peneliti dalam memahami dan mendalami ilmu yang didapat selama studi pada jurusan Ilmu Administrasi Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau khususnya kebijakan publik

2. Manfaat Praktis

1. Sebagai salah satu sumber pemikiran dan informasi sertrtaa bahab referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya, khususnya pada bidang yang sama
2. Bahan masukan dan informasi bagi pemerintah dalam Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan

Swadaya (BSPS) di Kota Pekanbaru.

Konsep Teori

Dalam penelitian, konsep teori digunakan untuk memberikan landasan atau dasar berpijak yang dapat membantu peneliti dalam memecahkan masalah, kerangka teori dimaksudkan untuk memberikan gambaran dan batasan tentang teori yang akan dipakai sebagai landasan penelitian yang akan dilakukan.

a. Implementasi Kebijakan

Menurut **Donald Van Metter dan Carl Van Horn** dalam **Sujianto (2008:34)** mengembangkan model implementasi kebijakan klasik yang mengasumsi bahwa implementasi kebijakan sejalan dengan proses kebijakan. Ada enam variabel yang menentukan keberhasilan kebijakan antara lain :

1. Standar dan tujuan kebijakan

Van Metter dan Van Horn mengemukakan untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan tentunya menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh pelaksana kebijakan, kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran tersebut.

2. Sumber daya kebijakan (policy resources)

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Selain sumber daya manusia, sumber daya finansial dan waktu menjadi perhitungan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan.

3. Karakteristik pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang

akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan. Hal ini penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya.

4. Aktivitas pengamatan dan komunikasi interorganisasional

Agar kebijakan public bisa dilaksanakan dengan efektif, menurut Van Metter dan Van Horn apa yang menjadi standar tujuan harus dipahami oleh para individu (*implementers*) yang bertanggung jawab atas pencapaian standar dan tujuan kebijakan, karena itu standard dan tujuan harus dikomunikasikan kepada para pelaksana. Komunikasi dalam kerangka penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan tentang apa menjadi standard dan tujuan harus konsisten dengan seragam (*consistency and uniformity*) dari berbagai sumber informasi.

5. Disposisi atau sikap pelaksana

Menurut pendapat Van Metter dan Van Horn sikap atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan public. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah berhasil formulasi warga setempat yang mengenal betul permasalahan atau persoalan yang mereka rasakan.

6. Kondisi ekonomi, sosial dan politik

Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi kebijakan adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mengundang keberhasilan kebijakan publik. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan

kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya implementasi kebijakan mensyaratkan kondisi lingkungan eksternal yang kondusif.

b. Program

Menurut **Nakamura dan Smallwood** dalam **Sujianto (2008:152)** mengemukakan bahwa ada tiga cara yang dominan untuk mengetahui keberhasilan pelaksanaan program :

- a. Prespektif yang menilai keberhasilan pelaksanaan program dari aspek kepatuhan aparat birokrat bawahan pada birokrat atasannya, atau derajat kepatuhan birokrasi-birokrasi pada umumnya terhadap mandat kebijakan dituangkan dalam undang-undang.
- b. Keberhasilan pelaksanaan program dari segi berfungsinya prosedur-prosedur rutin dalam pelaksanaan program dan tidak adanya konflik kedua perspektif ini mendefinisikan keberhasilan pelaksanaan program dilihat dari segi proses.
- c. Keberhasilan pelaksanaan program dilihat dari segi pencapaian tujuan-tujuan programatis yang diharapkan dari dampak program.

Solihin (2009:71) mengatakan bahwa program merupakan serangkaian kegiatan yang memiliki durasi waktu tertentu serta dibuat untuk mendukung tercapainya tujuan perusahaan. Disamping itu, **Abadi** dalam **Jones (2012:19)** mengatakan bahwa yang dimaksud dengan program adalah cara yang disakan untuk mencapai tujuan, kebijakan-kebijakan, prosedur, prosedur, pemberian tugas, langkah-langkah yang diambil, sumber-sumber yang dimanfaatkan dan elemen-elemen yang diperlukan untuk melaksanakan arah dan tindakan tertentu.

Metode Penelitian

Menurut **Sugiyono (2014:2)** metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan.

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan jenis penelitiannya ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, yang mana studi ini memusatkan perhatian pada masalah/ fenomena yang ada pada saat penelitian dilakukan, yang bersifat aktual, yang kemudian digambarkan realita yang jelas dan bertujuan untuk mengetahui secara terperinci Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kota Pekanbaru Tahun 2016.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau sebagai pelaksana dari program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru sebagai pelaksana teknis dan Kelurahan Tangkerang Utara sebagai salah satu kelurahan yang menerima program BSPS dengan pertimbangan bahwa implementasi program BSPS yang tidak mencapai target pada tahun 2016.

3. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah seseorang atau sekelompok orang yang menjadi sumber data dalam penelitian atau orang yang member keterangan kepada penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan informan sebagai objek informasi untuk mengetahui tentang Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Adapun informan penelitian ini adalah:

1. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) program BSPS Dinas Perumahan, Kawasan

- Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau
- 2. Kepala Subbagian Umum Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru
- 3. Lurah di Kelurahan Tangkerang Utara
- 4. Ketua Kelompok Program BSPS di Kelurahan Tangkerang Utara
- 5. Masyarakat penerima program BSPS

4. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Adalah data yang diperoleh dari informan yang menjadi subjek penelitian, berupa informasi yang relevan dengan masalah-masalah yang sudah dirumuskan dalam penelitian. Data primer ini diperoleh dari :

- a. Melakukan wawancara dengan informan penelitian yang terkait dengan masalah penelitian Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kota Pekanbaru Pada Tahun 2016.
- b. Melalui observasi lapangan yang dilakukan.

2. Data Sekunder

Adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen, buku-buku, dan dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu data berupa dokumen tentang Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kota Pekanbaru Pada Tahun 2016 dan buku-buku yang dapat mendukung dan menjelaskan masalah yang sedang diteliti.

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara yakni teknik pengumpulan data yang diperlukan mendapatkan keterangkapan keterangan lisan melalui komunikasi langsung bertatap muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan kepada peneliti terkait informasi

yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Yang diwawancarai seputar Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kota Pekanbaru Tahun 2016

- b. Observasi yaitu teknik ini dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan langsung dengan objek penelitian guna mendapatkan informasi yang ada hubungannya dengan penelitian.
- c. Dokumentasi yaitu ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, yaitu menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, buku-buku relevan, gambar, audio maupun elektronik dan data yang relevan.

6. Analisis Data

Teknik analisa data pada penelitian ini dilakukan dengan kualitatif dimana penulis tidak hanya memberikan penilaian terhadap data yang ada, tetapi akan lebih memprioritaskan kepada gambaran situasi atau secara umum disebut dengan deskriptif analisis. Proses analisis dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, seperti pengamatan secara langsung. Setelah data-data yang diperlukan sudah terkumpul, maka penulis memilihnya menurut jenis data yang diperoleh dan berusaha mengumpulkan teori. Metode deskriptif yaitu proses analisa secara sistematis faktual dan akurat dalam pengambilan suatu kesimpulan, dengan cara membandingkan antara kenyataan yang sebenarnya antara kenyataan yang sebenarnya dengan teori-teori dan membahasnya dengan menguraikan, dimana sebelumnya data dikumpulkan, ditabulasi dan di persentasekan serta dianalisis relevan dengan tujuan penelitian.

Hasil dan Pembahasan

A. Implementasi Program BSPS Tahun 2016 di Kota Pekanbaru dilihat dari Peraturan Menteri PUPR Nomor

13/PRT/M/2016 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya

1. Penetapan calon penerima Program BSPS

Dalam melaksanakan penetapan calon penerima program BSPS, ada sedikit kurang komunikasi yang terjadi, sehingga ada calon penerima yang ditetapkan oleh Kementerian PUPR yang telah menerima program dari Kota namun mendapatkan lagi, tapi setelah dilakukan identifikasi dan verifikasi baru penerima yang sesuai dengan ketentuan didapatkan. Dan ada juga masyarakat yang menolak menerima bantuan karena tidak mau melakukan swadaya padahal tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan keswadayaan masyarakat Indonesia khususnya kota Pekanbaru yang mulai kurang.

2. Penyaluran Program BSPS

Untuk penyaluran BSPS sampai pembangunan di Kelurahan Tangkerang Utara dapat dikatakan berjalan lancar, walaupun ada kekurangan bahan namun langsung ditanggapi oleh tim teknis Kota Pekanbaru. Dapat dilihat komunikasi yang dilakukan oleh tim teknis dengan penerima program dikatakan lancar.

3. Pemanfaatan BSPS

Masyarakat Indonesia yang dikenal dengan sifat gotong royong mulai jarang melaksanakan ciri khas budaya Indonesia tersebut dikarenakan sibuk dengan urusan pribadi dan mulai adanya sikap acuh tak acuh dengan lingkungan dan masyarakat dilingkungannya. Dengan adanya program swadaya untuk membantu melakukan pembangunna baru atau peningkatan kualitas rumah untuk masyarakat MBR, semoga ciri khas bangsa Indonesia yang terkenal dengan sifat gotong ryong dikenal lagi.

B. Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dilihat dari Teori Implementasi

Untuk mengetahui Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan

Swadaya Tahun 2016 (Studi Kasus Kota Pekanbaru), maka penulis menggunakan indicator sebagai berikut dnegan teori yang dinyatakan oleh **Donald Van Meter** dan **Carln Van Horn** dalam **Sujianto (2008:34)** yang dipengaruhi oleh enam variabel namun penulis menggunakan lima variabel yaitu Standard dan tujuan kebijakan, Sumber daya kebijakan (*Policy resources*), Aktivitas pengamatan dan komunikasi interorganisasi, Disposisi atau sikap pelaksana, Kondisi ekonomi, sosial dan politik. Untuk membahas Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahun 2016 (Studi Kasus Kota Pekanbaru) dilihat dari :

1. Standard dan tujuan kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya dari ukuran dan tujuan kebijakan yang bersifat realistis dengan sosio-kultur yang ada di level pelaksana kebijakn. Ketika ukuran dan sasaran kebijakan terlalu ideal, maka akan sulit untuk direalisasikan. Untuk program Bantuan Stimulan Perumahan Sawada, ada beberapa syarat untuk menjadi penerima program.

Untuk standar program BSPS para pelaksana sudah mengikuti standar yang diberikan oleh Kementerian PUPR dengan melakukan verifikasi dan menemukan banyaknya masyarakat yang kekurangan administrasi sehingga tujuan dari Program BSPS tercapai. Hal ini bisa dilihat dari Kelurahan Tangkerang Utara yang awal penerima program adalah 40 setelah dilakukan verifikasi tinggal 20 penerima program.

2. Sumber daya kebijakan (*Policy resources*)

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang paling terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Setiap tahap implementasi menuntut adanya sumber

daya manusia yang paling berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Selain sumber daya manusia sumber dana juga merupakan hal yang penting dikarenakan untuk melakukan sebuah program dana harus mencukupi agar tercapainya program.

Untuk permasalahan sumber daya intensif yang lama datang karena stok ditoko yang tidak ada juga cepat di respon oleh TFL dan Tim Teknis. Jadi dilihat dari sumber daya program walaupun adanya kekurangan bahan tetapi bisa dikatakan baik karena sumber daya manusia yaitu TFL dan Tim Teknis yang cepat menanggapi.

3. Aktivitas pengamatan dan komunikasi interorganisasi

Agar kebijakan publik bisa dilaksanakan dengan efektif, menurut **Van Horn dan Van Mater** apa yang menjadi standar tujuan harus dipahami oleh para individu (implementers). Yang bertanggung jawab atas pencapaian standar dan tujuan kebijakan, karena itu standar dan kebijakan harus dikomunikasikan kepada para pelaksana tentang apa yang menjadi standar dan tujuan harus konsisten dan seragam dari berbagai sumber informasi. Untuk komunikasi dan aktivitas pengamatan dapat dikatakan lancar, dapat dilihat dari tanggapan yang diberikan oleh Ketua Kelompok Kelurahan Tangkerang Utara.

4. Disposisi atau sikap pelaksana

Menurut pendapat Van Meter dan Van Horn sikap penolakan dan penerimaan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul permasalahan dan persoalan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan publik yang biasanya bersifat *top down* yang sangat mungkin para pengambil

keputusan tidak mengetahui bahkan tak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang harus diselesaikan.

Walaupun banyak program pemerintah yang tidak berjalan dengan mulus disebabkan sikap pelaksana yang tidak mengetahui kebutuhan yang diinginkan oleh sasaran/penerima program, namun pada program BSPS para pelaksana yang sebelum melakukan pelaksanaan program diberikan pemahaman melalui bahan yang ada dan melakukan musyawarah jadi walaupun awalnya pelaksana tidak mengetahui keinginan, kebutuhan dan permasalahan yang dialami karena adanya musyawarah pelaksana jadi lebih memahami.

5. Kondisi ekonomi, sosial dan politik

Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi kebijakan adalah sejauh mana lingkungan eksternal mendorong keberhasilan kebijakan publik. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya implementasi kebijakan mensyaratkan kondisi lingkungan eksternal yang kondusif .

Banyaknya program yang membantu MBR untuk mendapatkan Rumah Layak Huni merupakan hal yang bagus, namun juga menjadi kesulitan untuk mencapai target. Karena untuk semua program yang ada, data yang diberikan hanya seklai penyerahan yang menyebabkan masyarakat yang telah menerima akan menerima lagi. Walaupun permasalahan ini akan menjadi tanggung jawab pelaksana dengan melakukan verifikasi yang ketat namun akan lebih bagus kalau pemerintah lebih fokus kepada satu program dan akhirnya masyarakat pun tidak ada kesalahpahaman karena setiap program beda pelaksanaannya beda juga hasil dari program yang menyebabkan masyarakat menolak satu program untuk program yang lain.

Kesimpulan

Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya sudah berjalan dengan baik apabila dilihat penerima program merupakan masyarakat berpenghasilan rendah yang tidak mampu untuk membangun tempat tinggal yang layak. Namun dalam pelaksanaannya, banyak ditemukan permasalahan seperti penolakan dari masyarakat, adanya program lain. Walaupun permasalahan dana tidak ada dikarenakan penerima program langsung mendapatkan dana dan langsung dijadikan bahan bangunan, tetapi kekurangan stok dari toko bangunan yang menjadi penyedia barang menjadi pengendala. Namun apabila dilihat dari keseluruhan, Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahun 2016 (Studi Kasus Kota Pekanbaru) dikatakan sudah berjalan dengan baik.

Saran

Program ini juga menjadi salah satu cara untuk meningkatkan rasa gotong-royong dan saling membantu masyarakat Indonesia khususnya Kota Pekanbaru yang sempat hilang. Dengan adanya program ini, masyarakat saling membantu untuk membangun rumah warga berpenghasilan rendah yang tidak layak huni menjadi layak huni. Dengan mendapatkan data terbaru dari setiap kota yang ada di Indonesia sehingga tidak ada penerima program yang telah mendapatkan program lain sebelumnya yang mengajukan diri lagi, dan yang menerima program adalah masyarakat berpenghasilan rendah yang mampu berswadaya yang mendapatkan program ini.

Daftar Pustaka

Nugroho, Riant. 2012. *Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan dan Manajemen Kebijakan*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo

Purwanto, Erwan Agus dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasi di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media

Samosir, Siska Indriyani. 2016. *Implementasi Program Rumah Layak Huni di Kabupaten Kampar*. Pekanbaru

Sugiyono, 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta

Sujianto, 2008. *Implementasi Kebijakan Publik "Konsep dan Aplikasinya"*. Pekanbaru: Alaf Riau